

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN KEMISKINAN  
MELALUI PROGRAM DESA TUNTAS KEMISKINAN (DESA TUMIS)  
DI KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH**

Bella Ayu Purwa Shinta Putri  
NPP 32.0417

*Asdaf Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah*  
*Program Studi Studi Kebijakan Publik*  
Email: [32.0417@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0417@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Adfin Rochmad Baidhowah, S.IP., M.PA

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** Poverty alleviation in Sragen Regency, Central Java Province, remains a complex and urgent challenge. Despite various government programs, there are still disparities in access to resources, weak institutional capacity, and limited community participation in existing initiatives. The Tuntas Kemiskinan Village Program (Desa Tumis) is expected to serve as an effective solution through a collaborative approach involving the government, community, and private sector. **Purpose:** This study aims to understand the implementation of Collaborative Governance in poverty alleviation through the Desa Tumis Program in Sragen Regency. The main focus is to explore how collaboration among various actors can enhance the effectiveness of the program in reducing poverty rates and improving community welfare. **Method:** This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The data obtained were analyzed using data condensation, data display, and conclusion drawing to gain a comprehensive picture of the program's implementation. **Result/Findings:** The results indicate that the implementation of Collaborative Governance in the Desa Tumis Program involves various actors, including local government, the community, non-governmental organizations (NGOs), and the private sector. Although collaborative efforts are in place, challenges such as power, resource, and knowledge asymmetries among actors remain. The program has improved the quality of life for poor communities in targeted villages by increasing access to basic services, skill training, and social assistance. However, strengthening institutional capacity and inter-party coordination is still needed to achieve more optimal outcomes. These findings support the conclusion that the success of the program relies heavily on inclusive and participatory collaboration, as well as on empowering the community at every stage of the program. **Conclusion:** The Desa Tumis Program in Sragen Regency demonstrates effective collaborative governance in poverty alleviation through cooperation among government, communities, and other stakeholders. Its success is supported by active participation, shared commitment, and effective communication, although challenges such as limited resources and varying actor capacities remain.

**Keywords:** Collaborative Governance, Poverty Alleviation, Desa Tumis, Sragen Regency, Empowerment Program.

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, merupakan tantangan yang kompleks dan mendesak. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program, masih terdapat ketidakmerataan dalam akses terhadap sumber daya, rendahnya kapasitas kelembagaan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam program-program yang ada. Program Desa Tuntas Kemiskinan (Desa Tumis) diharapkan dapat menjadi solusi efektif melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam penanganan kemiskinan melalui Program Desa Tuntas Kemiskinan (Desa Tumis) di Kabupaten Sragen. Fokus utama penelitian adalah untuk mengeksplorasi bagaimana kolaborasi antar berbagai aktor dapat meningkatkan efektivitas program dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan program. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam Program Desa Tumis melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan sektor swasta. Meskipun terdapat upaya kolaboratif, tantangan seperti ketimpangan kekuasaan, sumber daya dan pengetahuan antar aktor masih menjadi hambatan. Program ini berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin di desa-desa yang menjadi target, dengan adanya peningkatan akses terhadap layanan dasar, pelatihan keterampilan, dan bantuan sosial. Namun, masih diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar pihak untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Temuan ini mendukung kesimpulan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kolaborasi yang inklusif dan partisipatif serta perlunya penguatan peran masyarakat dalam setiap tahap program. **Kesimpulan:** Program Desa Tumis di Kabupaten Sragen menunjukkan praktik *collaborative governance* yang efektif dalam penanganan kemiskinan melalui kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya. Keberhasilan program ditunjang oleh partisipasi aktif, komitmen bersama, dan komunikasi yang baik, meskipun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kapasitas aktor. **Kata Kunci :** *Collaborative Governance*, Penanganan Kemiskinan, Desa Tumis, Kabupaten Sragen, Program Pemberdayaan.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan tetap menjadi tantangan besar di Indonesia (Emerson, K., 2012). Pada tahun 2019, persentase penduduk miskin Indonesia mencapai 9,22%. Namun, angka ini mengalami penurunan menjadi 9,13% pada tahun 2020, meskipun sempat meningkat akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, angka kemiskinan turun lebih lanjut menjadi 9,00%, dan pada tahun 2022, persentase penduduk miskin kembali menurun menjadi 8,90%. Berdasarkan data 2023, angka kemiskinan Indonesia berada pada 8,56%. Meskipun penurunan ini terhambat oleh pandemi, pemerintah terus berupaya melalui program bantuan sosial dan kebijakan ekonomi untuk menanggulangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan rakyat (Intania, D. I., 2023).

**Tabel 1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2019-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk (jiwa)</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin (%)</b>
2019	266.911.900	25.144.720	9,41
2020	270.203.900	26.424.020	9,78
2021	272.682.500	27.542.770	10,14
2022	275.773.800	26.161.160	9,54
2023	278.696.200	25.900.000	9,36

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan fluktuasi dalam jumlah penduduk miskin di Indonesia dari Tahun 2019 hingga 2023. Jumlah penduduk miskin pada Tahun 2020 adalah 26.424.020 jiwa dengan persentase 9,78%; Tahun 2021 mencapai angka tertinggi 27.542.770 jiwa dengan persentase 10,14%; kemudian pada Tahun 2022 dan 2023, jumlah penduduk turun sebanyak 26.161.160 jiwa dan 25.900.000 jiwa dengan persentase 9,54% dan 9,36%. Jumlah penduduk terus meningkat, dan jumlah penduduk di setiap provinsi juga meningkat (Ghonniyu, A. R., 2024).

Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah menunjukkan penurunan yang signifikan meskipun provinsi ini masih memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi. Pada tahun 2019, angka kemiskinan di Jawa Tengah tercatat sebesar 11,2%, dan pada tahun 2020 turun menjadi 10,8%. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2021 dengan angka kemiskinan sebesar 10,5%. Pada tahun 2022, angka kemiskinan di Jawa Tengah semakin turun menjadi 10,4%, dan pada tahun 2023 mencapai 10,3%. Meskipun penurunan ini terjadi, Jawa Tengah masih berada di posisi ketiga provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak setelah Jawa Barat dan Jawa Timur (Fakhriansyah, M. A., 2023).

**Tabel 2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2019-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk (jiwa)</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin (%)</b>
2019	34.718.204	3.743.230	10,80
2020	36.516.035	3.980.900	11,41
2021	36.742.501	4.109.750	11,79
2022	37.032.410	3.831.440	10,93
2023	37.540.962	3.791.500	10,77

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019 hingga 2023, rata-rata angka kemiskinan di Jawa Tengah tercatat sebesar 10,80%. Meskipun ada fluktuasi, angka kemiskinan ini menunjukkan penurunan secara keseluruhan. Pada tahun 2020, angka kemiskinan meningkat menjadi 11,79%, yang lebih tinggi 0,61% dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2021, angka kemiskinan kembali meningkat 0,38%, mencapai 11,79%. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan sebesar 0,86% menjadi 10,93%, dan pada tahun 2023, angka kemiskinan kembali turun 0,16%, menjadi 10,77%. Rata-rata angka kemiskinan di Jawa Tengah dalam periode tersebut mencapai 11,14%, menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah penduduk, penurunan angka kemiskinan masih terjadi di

provinsi ini. Selain itu, Jawa Tengah memiliki 29 kabupaten dan 6 kota dengan tingkat kemiskinan yang tinggi (Fakhriansyah, M. A., 2023).

Kabupaten Sragen tercatat sebagai salah satu kabupaten termiskin ke-8 di Jawa Tengah dengan rasio kemiskinan pada Tahun 2019 sebesar 12,79%, Tahun 2020 sebesar 13,38%, Tahun 2021 sebesar 13,83%, Tahun 2022 sebesar 12,94%, dan Tahun 2023 sebesar 12,87%. Meskipun berada di posisi ke-8 termiskin di Jawa Tengah, Sragen memiliki persentase penduduk miskin tertinggi di antara kabupaten/kota di Eks Karesidenan Surakarta. Eks Karesidenan Surakarta terdiri dari tujuh kabupaten/kota, yaitu Sragen, Wonogiri, Boyolali, Klaten, Karanganyar, Sukoharjo, dan Kota Surakarta (Saputra, D. J, 2022). Dari ketujuh wilayah tersebut, Sragen memiliki persentase penduduk miskin tertinggi, menunjukkan tantangan ekonomi yang lebih besar dibandingkan kabupaten/kota lainnya di wilayah tersebut (Intania, D. I., 2023).

Persentase kemiskinan di Kabupaten Sragen dalam wilayah Eks Karesidenan Surakarta menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Rata-rata persentase kemiskinan di Kabupaten Sragen dari tahun 2010 hingga 2023 tercatat sebesar 13,16%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan Jawa Tengah yang sebesar 11,25% dan angka nasional yang sebesar 9,72%. Perkembangan tingkat kemiskinan di Sragen perlu dianalisis dengan melihat jumlah penduduk miskin yang terus mengalami perubahan. Pada tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Sragen tercatat sebanyak 890.518 jiwa, dan meningkat menjadi 976.951 jiwa pada tahun 2020. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin Sragen tercatat sebanyak 983.641 jiwa, dengan angka yang tetap pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, jumlah penduduk kembali meningkat menjadi 997.490 jiwa. Total jumlah penduduk Kabupaten Sragen dalam rentang waktu 2019 hingga 2023 adalah 4.832.241 jiwa (Sugiharto, A. S. Z., 2024).

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sragen mengalami fluktuasi, dengan 113.800 jiwa pada tahun 2019, meningkat menjadi 976.951 jiwa pada 2020, dan 938.641 jiwa pada 2021 dan 2022. Rata-rata jumlah penduduk miskin selama periode ini adalah 966.448 jiwa, dengan total 4.832.241 jiwa. Dalam upaya mengatasi kemiskinan yang masih tinggi, Pemerintah Kabupaten Sragen meluncurkan Program Desa Tuntas Kemiskinan (Desa Tumis) pada 2022. Program ini fokus pada pemberdayaan masyarakat desa dengan melibatkan sektor pemerintahan, masyarakat, dan swasta. Tujuan program ini adalah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin melalui penilaian rumah ke rumah dan mendorong gotong royong antar pemangku kepentingan. Program Desa Tumis juga menyediakan bantuan modal usaha untuk UMKM, perbaikan rumah, sambungan listrik, akses sanitasi, beasiswa pendidikan, dan layanan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat. Semua bantuan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Penelitian mengenai penerapan *Collaborative Governance* dalam penanggulangan kemiskinan telah banyak dilakukan di berbagai daerah dengan konteks program yang beragam, seperti program *Gandeng Gendong* di Yogyakarta atau *Dusun Terpadu Mandiri* di Gorontalo, namun belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif mengkaji penerapan model tersebut dalam *Program Desa Tuntas Kemiskinan (Desa Tumis)* di Kabupaten Sragen. Padahal, Kabupaten Sragen menempati posisi signifikan sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di wilayah Eks Karesidenan Surakarta, dan telah menginisiasi pendekatan kolaboratif lintas sektor sejak tahun 2022. Sebagian besar studi terdahulu lebih terfokus pada dimensi konseptual kolaborasi atau pada program dengan cakupan berbeda, sehingga belum memberikan gambaran empiris yang mendalam mengenai dinamika desain kelembagaan,

peran kepemimpinan fasilitatif, serta efektivitas proses kolaboratif sebagaimana dijabarkan dalam model *Collaborative Governance* oleh Ansell dan Gash (2008) (Ansell, C., & Gash, A., 2008). Oleh karena itu, studi ini menjadi relevan untuk mengisi kekosongan literatur dengan mengeksplorasi secara kritis praktik kolaborasi lintas aktor dalam kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis desa di Sragen, guna memperoleh pemahaman yang lebih holistik terkait efektivitas tata kelola kolaboratif dalam konteks lokal.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih mengakar di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Meski pemerintah telah meluncurkan berbagai program, termasuk Program Desa Tuntas Kemiskinan (Desa Tumis), angka kemiskinan tetap tinggi dan menunjukkan bahwa intervensi belum sepenuhnya efektif. Program Desa Tumis hadir dengan pendekatan *Collaborative Governance* yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Namun, implementasi kolaborasi ini di tingkat desa belum banyak mendapat sorotan dalam kajian ilmiah.

Penelitian sebelumnya oleh Rutiana Dwi Wahyunengseh, Sri Hastjarjo, dan Didik Gunawan Suharto (2020), berjudul "*Diseminasi Komponen Collaborative Governance untuk Penyusunan Peraturan Walikota tentang Penanggulangan Kemiskinan*", menggunakan pendekatan kualitatif dan teori *Collaborative Governance* dari Ansell & Gash. Penelitian tersebut menekankan pentingnya integrasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyusunan regulasi penanggulangan kemiskinan, khususnya yang berbasis CSR. Namun, penelitian tersebut masih terbatas pada konteks kebijakan dan regulasi di tingkat kota. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang mengkaji bagaimana *Collaborative Governance* diterapkan secara langsung dalam konteks program penanggulangan kemiskinan di desa, seperti Program Desa Tumis, yang menjadi fokus dalam penelitian ini (Wahyunengseh, R. D., Hastjarjo, S., & Suharto, D. G., 2020).

Penelitian oleh Sofa Miftakhul Iza dan Ismi Dwi Astuti Nurhaeni (2021) yang berjudul "*Proses Kolaborasi dalam Penanganan Kemiskinan: Studi Kasus Program Gandeng Gendong di Yogyakarta*" menggunakan teori *Collaborative Governance* dari Ansell & Gash dan menjelaskan kolaborasi antar lima unsur (Kota, Kampus, Korporasi, Kampung, Komunitas). Meskipun menunjukkan model kolaboratif yang inovatif, penelitian tersebut masih terbatas pada program berbasis perkotaan dan belum menelaah penerapan kolaborasi di wilayah pedesaan secara mendalam. Selain itu, ditemukan kendala pada minimnya partisipasi masyarakat dan belum kuatnya peran kelurahan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berupaya mengisi gap dengan mengkaji secara spesifik penerapan *Collaborative Governance* dalam program penanggulangan kemiskinan di tingkat desa melalui Program Desa Tumis di Kabupaten Sragen (Iza, S. M., & Nurhaeni, I. D. A., 2021).

Penelitian Novy Setia Yunas dan Fazadhora Nailufar (2019), berjudul "*Collaborative Governance Melalui Program Kampung KB di Kabupaten Jombang*", menggunakan teori *Collaborative Governance* dari Ansell & Gash. Penelitian tersebut menggambarkan keberhasilan kolaborasi antara pemerintah, CSO, sektor swasta, dan masyarakat dalam memperkuat program keluarga berencana sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan. Meskipun memberikan hasil signifikan, penelitian ini masih berfokus pada konteks program tematik (KB) dan menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran serta koordinasi lintas aktor. Berbeda dengan itu, penelitian ini mengisi celah dengan mengkaji pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam konteks program penanggulangan kemiskinan berbasis desa (Desa Tumis), yang menuntut dinamika kolaboratif yang lebih kompleks dan kontekstual sesuai karakteristik lokal Kabupaten Sragen (Yunas, N. S., & Nailufar, F. D., 2019).

Penelitian oleh Samin Latif dan Ikram Muhammad (2020) berjudul "*Model Collaborative Governance dalam Penanggulangan Kemiskinan di Daerah: Studi Kasus*

*Program Dusun Terpadu Mandiri di Provinsi Gorontalo*” mengulas kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam membangun dusun terpadu. Penelitian tersebut menemukan bahwa meskipun program berjalan efisien dan partisipatif, masih terdapat dominasi pemerintah dan terbatasnya peran aktor non-pemerintah dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini fokus pada dinamika kolaboratif dalam program Desa Tumis yang secara khusus menargetkan kemiskinan desa melalui pendekatan partisipatif. Penelitian ini bertujuan mengisi gap dengan menganalisis secara mendalam peran semua aktor dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kolaboratif di tingkat desa (Latif, S., 2018).

Penelitian Abdika Jaya, Mardi Murahman, dan Amra Muslimin (2023) berjudul “*Collaborative Governance dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas*” menunjukkan bahwa implementasi kolaboratif seringkali tidak efektif karena belum adanya keseragaman persepsi tentang definisi kemiskinan antar aktor, lemahnya desain kelembagaan, serta kurangnya kepemimpinan fasilitatif. Selain itu, pelaksanaan program terfragmentasi akibat minimnya sinkronisasi data antara pusat dan daerah. Kesenjangan ini menunjukkan pentingnya kajian baru yang lebih fokus pada konteks desa dan partisipasi aktor lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam Program Desa Tumis di Kabupaten Sragen, serta mengevaluasi tantangan dan efektivitas kolaborasi lintas aktor dalam penanggulangan kemiskinan secara langsung di tingkat desa Jaya, (A., Murahman, M., & Muslimin, A., 2023).

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini berjudul “*Collaborative Governance dalam Penanganan Kemiskinan melalui Program Desa Tuntas Kemiskinan (Desa Tumis) di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah*” memiliki kebaruan ilmiah yang signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Fokus utama penelitian ini adalah Kabupaten Sragen, yang merupakan salah satu kabupaten termiskin di Jawa Tengah dengan karakteristik sosial-ekonomi yang unik, termasuk ketergantungan pada sektor pertanian dan keterbatasan akses infrastruktur. Penelitian ini membahas Program Desa Tumis, sebuah inisiatif lokal yang menggabungkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan akademisi dengan model "gotong royong" khas, yang belum banyak diteliti sebelumnya. Pendekatan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas program nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau inisiatif serupa yang tidak menyoroti kolaborasi sekompleks ini.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi program tersebut, seperti asimetri sumber daya, koordinasi lemah, dan kapasitas SDM terbatas, serta memberikan rekomendasi konkret untuk mengatasi masalah tersebut, antara lain dengan peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat desa, penguatan transparansi melalui pelaporan terbuka, dan penyelarasan kebijakan antara pemerintah kabupaten dan desa. Hal ini membedakan penelitian ini dari studi-studi sebelumnya yang lebih banyak fokus pada evaluasi program tanpa menawarkan solusi praktis untuk konteks lokal. Penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2008) dengan modifikasi untuk menyesuaikan konteks lokal, yang mencakup analisis tentang peran kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaboratif di tingkat desa. Beberapa penelitian sebelumnya menggunakan teori yang sama namun tidak mengaitkannya dengan dinamika partisipasi masyarakat dan peran sektor swasta.

Metode penelitian yang digunakan juga lebih komprehensif, menggabungkan data primer melalui wawancara dengan aktor kunci seperti Dinas Sosial dan TKPKD, serta data sekunder dari dokumen kebijakan, laporan anggaran, dan statistik kemiskinan, untuk memberikan analisis yang lebih holistik. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih mengandalkan data sekunder atau wawancara terbatas. Temuan penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang langsung aplikatif untuk Kabupaten Sragen, seperti perlunya

pelatihan bagi perangkat desa dalam mengelola program kolaboratif dan pentingnya integrasi data kemiskinan antar-OPD untuk menghindari tumpang tindih. Rekomendasi ini lebih spesifik dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung memberikan saran kebijakan yang generik atau tidak langsung aplikatif untuk daerah tertinggal.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dengan mengisi celah literatur tentang *Collaborative Governance* di daerah rural, menawarkan model kolaborasi kontekstual melalui Program Desa Tumis, dan memberikan solusi praktis berbasis temuan lapangan untuk memperbaiki tata kelola penanganan kemiskinan, yang memiliki nilai aplikatif tinggi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

## **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan dan mengkaji masalah serta menganalisis faktor penghambat *Collaborative Governance* dalam Penanganan Kemiskinan melalui Program Desa Tuntas Kemiskinan (Desa Tumis) di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam Program Desa Tuntas Kemiskinan (Desa Tumis) di Kabupaten Sragen (Sen, A., 2024). Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang mendalam dan kompleks mengenai interaksi antar aktor dalam program tersebut, serta memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi pelaksanaan program. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang memberikan gambaran holistik tentang dinamika kolaborasi dalam penanganan kemiskinan (Huberman, A., 2014).

Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen, anggota Tim Gotong Royong Desa Tumis, dan masyarakat penerima bantuan. Pemilihan informan ini didasarkan pada peran mereka yang signifikan dalam pelaksanaan program, di mana Kepala Dinas Sosial memiliki wawasan strategis mengenai kebijakan dan penganggaran, sementara anggota Tim Gotong Royong dan masyarakat penerima bantuan memberikan perspektif langsung tentang implementasi dan dampak program di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, selama periode Januari hingga April 2025. Lokasi penelitian dipilih karena Kabupaten Sragen merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan menjadi fokus dari Program Desa Tumis. Durasi penelitian yang berlangsung selama empat bulan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang komprehensif dan mendalam, serta melakukan analisis terhadap hasil yang diperoleh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan kebijakan dan praktik penanganan kemiskinan di daerah tersebut (Kumar, R., 2018).

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Kondisi Awal *Collaborative Governance* dalam Upaya Penanganan Kemiskinan melalui Desa Tuntas Kemiskinan (Desa Tumis) di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah**

Kondisi awal pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam Program Desa Tuntas Kemiskinan (Desa Tumis) di Kabupaten Sragen menunjukkan adanya potensi yang baik, namun juga diwarnai oleh berbagai tantangan. Program ini dimulai dengan kesadaran akan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengatasi masalah kemiskinan yang semakin meningkat, terutama setelah dampak pandemi COVID-19.

Pada tahun 2022, program ini diluncurkan dengan tujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin di desa melalui penilaian yang dilakukan secara langsung.

Salah satu aspek penting dari kondisi awal ini adalah adanya ketimpangan dalam kekuasaan, sumber daya, dan pengetahuan antar aktor yang terlibat. Pemerintah daerah, melalui Dinas Sosial dan Bappeda, memiliki kontrol yang lebih besar terhadap kebijakan dan penganggaran, sementara pemerintah desa dan masyarakat sering kali berperan sebagai pelaksana tanpa keterlibatan yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Hal ini menciptakan ketidakpuasan di tingkat desa, di mana perangkat desa merasa kurang diberdayakan dan tidak memiliki suara yang cukup dalam proses kolaborasi.

Selain itu, kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa juga menjadi tantangan. Banyak perangkat desa yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai pengelolaan program dan kolaborasi antar sektor. Laporan Monitoring dan Evaluasi menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari perangkat desa yang terlibat dalam pelatihan terkait penanganan kemiskinan kolaboratif, sehingga mengakibatkan rendahnya pemahaman tentang mekanisme program dan indikator keberhasilan yang diharapkan.

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sragen juga berkontribusi pada tantangan ini. Dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi, banyak masyarakat yang bergantung pada bantuan sosial dan kurang memiliki akses terhadap peluang ekonomi yang lebih baik. Hal ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, di mana masyarakat merasa terjebak dalam ketidakpastian dan kurangnya dukungan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Meskipun demikian, terdapat upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi ini. Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program, serta mendorong partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah desa. Dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan kolaborasi antar pihak.

Secara keseluruhan, kondisi awal *Collaborative Governance* dalam Program Desa Tumis di Kabupaten Sragen menunjukkan adanya potensi untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan, namun juga memerlukan perhatian serius terhadap tantangan yang ada. Peningkatan kapasitas kelembagaan, pelatihan bagi perangkat desa, dan penguatan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi langkah-langkah penting untuk memastikan keberhasilan program ini ke depannya.

### **3.2 Desain Kelembagaan *Collaborative Governance* dalam Upaya Penanganan Kemiskinan melalui Desa Tumis (Desa Tuntas Kemiskinan) di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah**

Desain kelembagaan dalam pelaksanaan Program Desa Tuntas Kemiskinan (Desa Tumis) di Kabupaten Sragen merupakan elemen kunci yang menentukan efektivitas kolaborasi antar berbagai aktor dalam penanganan kemiskinan. Program ini dibangun di atas kerangka kelembagaan yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat itu sendiri. Struktur kelembagaan ini dirancang untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki peran yang jelas dan dapat berkontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan bersama. Salah satu komponen utama dari desain kelembagaan ini adalah pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang berfungsi sebagai pengarah dan pengawas pelaksanaan program. Tim ini terdiri dari perwakilan berbagai OPD, termasuk Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan, yang masing-masing memiliki tanggung jawab spesifik dalam penanganan kemiskinan. Keberadaan TKPKD diharapkan dapat menciptakan sinergi antara sektor-sektor yang terlibat, sehingga program dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan efektif.

Namun, meskipun struktur kelembagaan telah ditetapkan, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu masalah yang muncul adalah ketidakjelasan peran antar lembaga, di mana beberapa OPD memiliki persepsi yang berbeda mengenai tanggung jawab mereka dalam program. Hal ini sering kali menyebabkan tumpang tindih tugas dan kurangnya koordinasi yang efektif. Selain itu, pemerintah desa sering kali merasa terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan, yang mengakibatkan rendahnya partisipasi mereka dalam pelaksanaan program. Desain kelembagaan juga mencakup mekanisme komunikasi dan koordinasi yang harus diperkuat. Rapat koordinasi rutin diadakan untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses perencanaan dan evaluasi program. Namun, efektivitas rapat ini sering kali terhambat oleh ketidakhadiran perwakilan dari beberapa OPD kunci, yang mengakibatkan kurangnya informasi dan pemahaman yang sama mengenai tujuan dan strategi program.

Pentingnya transparansi dalam desain kelembagaan juga tidak dapat diabaikan. Setiap keputusan yang diambil dalam program harus didokumentasikan dan dilaporkan kepada masyarakat untuk memastikan akuntabilitas. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan dalam penyampaian informasi antara pemerintah dan masyarakat, yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program. Desain kelembagaan *Collaborative Governance* dalam Program Desa Tuntas di Kabupaten Sragen menunjukkan potensi yang baik untuk penanganan kemiskinan, namun memerlukan penguatan dalam hal koordinasi, komunikasi, dan partisipasi masyarakat. Upaya untuk memperjelas peran masing-masing aktor, meningkatkan kapasitas kelembagaan, dan memastikan transparansi dalam pengelolaan program akan sangat penting untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan dalam pengentasan kemiskinan di daerah ini.

### **3.3 Kepemimpinan fasilitatif *Collaborative Governance* dalam Upaya Penanganan Kemiskinan melalui Desa Tuntas Kemiskinan (Desa Tumis) di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah**

Kepemimpinan fasilitatif merupakan elemen krusial dalam pelaksanaan *Collaborative Governance*, terutama dalam konteks Program Desa Tuntas Kemiskinan (Desa Tumis) di Kabupaten Sragen. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya berfungsi untuk mengarahkan dan mengelola program, tetapi juga untuk membangun hubungan yang harmonis antara berbagai aktor yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta. Dalam konteks ini, kepemimpinan fasilitatif berperan sebagai penghubung yang memastikan bahwa semua pihak dapat berkolaborasi secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama dalam penanganan kemiskinan.

Salah satu karakteristik utama dari kepemimpinan fasilitatif dalam Program Desa Tumis adalah kemampuan untuk menciptakan ruang dialog yang terbuka dan inklusif. Pemimpin daerah, seperti Bupati dan Kepala Dinas Sosial, secara aktif mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Melalui forum musyawarah desa dan rapat koordinasi, pemimpin memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan masukan mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program, tetapi juga memperkuat komitmen mereka untuk berkontribusi dalam pelaksanaan program. Namun, tantangan dalam kepemimpinan fasilitatif tetap ada. Beberapa perangkat desa merasa kurang diberdayakan dan tidak memiliki suara yang cukup dalam pengambilan keputusan. Ketidakjelasan peran antar lembaga dan ketidakhadiran perwakilan dari beberapa OPD dalam rapat koordinasi sering kali menghambat proses kolaborasi. Dalam hal ini, pemimpin perlu lebih proaktif dalam memastikan bahwa semua aktor, terutama pemerintah desa, terlibat secara aktif dan memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan mekanisme program.

Kepemimpinan fasilitatif juga mencakup kemampuan untuk membangun kepercayaan antar pihak. Dalam Program Desa Tumis, kepercayaan dibangun melalui transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program. Pemimpin daerah berkomitmen untuk memberikan laporan yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan dana dan hasil yang dicapai, sehingga masyarakat merasa lebih percaya dan terlibat dalam proses evaluasi program. Namun, masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa informasi disampaikan secara merata kepada semua pihak, terutama di desa-desa yang lebih terpencil. Kepemimpinan fasilitatif dalam Program Desa Tumis di Kabupaten Sragen menunjukkan potensi yang besar untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi dalam penanganan kemiskinan. Dengan memperkuat dialog, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan membangun kepercayaan antar aktor, kepemimpinan fasilitatif dapat menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan dalam program ini. Upaya untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan di tingkat desa dan memastikan bahwa semua pihak memiliki peran yang jelas dan terintegrasi akan sangat penting untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sragen.

#### **3.4 Proses Kolaboratif *Collaborative Governance* dalam Upaya Penanganan Kemiskinan melalui Desa Tuntas Kemiskinan (Desa Tumis) di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah**

Proses kolaboratif dalam pelaksanaan Program Desa Tuntas Kemiskinan (Desa Tumis) di Kabupaten Sragen merupakan inti dari pendekatan *Collaborative Governance* yang bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan secara efektif. Proses ini melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang bekerja sama untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin.

Salah satu langkah awal dalam proses kolaboratif ini adalah identifikasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Melalui musyawarah desa dan forum koordinasi, semua pihak terlibat dalam mendiskusikan tantangan yang dihadapi, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Proses ini tidak hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka, tetapi juga membantu menciptakan pemahaman bersama mengenai kondisi yang ada. Setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah merumuskan rencana tindakan yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Dalam konteks Program Desa Tumis, rencana ini mencakup berbagai intervensi, seperti pemberian bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pembangunan infrastruktur. Proses perencanaan ini dilakukan secara partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan dalam menentukan jenis bantuan yang paling dibutuhkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat memberikan dampak yang signifikan.

Selama pelaksanaan program, komunikasi yang efektif antara semua pihak menjadi kunci untuk menjaga kolaborasi yang baik. Rapat koordinasi rutin diadakan untuk memantau kemajuan program, membahas kendala yang dihadapi, dan mencari solusi bersama. Dalam proses ini, pemimpin daerah berperan sebagai fasilitator yang memastikan bahwa semua suara didengar dan setiap pihak memiliki kesempatan untuk berkontribusi. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal ketidakhadiran beberapa perwakilan dari OPD kunci yang dapat menghambat proses pengambilan keputusan. Evaluasi juga merupakan bagian penting dari proses kolaboratif ini. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas program dan dampaknya terhadap masyarakat. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian program agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi juga sangat penting, karena mereka dapat memberikan umpan balik yang berharga mengenai pelaksanaan program di lapangan.

Proses kolaboratif dalam Program Desa Tumis di Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa kolaborasi yang baik antara berbagai aktor dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dalam penanganan kemiskinan. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti ketidakhadiran dalam rapat koordinasi dan perbedaan pemahaman antar pihak, upaya untuk memperkuat komunikasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan melakukan evaluasi yang transparan akan sangat penting untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan dalam program ini. Proses kolaboratif ini tidak hanya berfokus pada pengentasan kemiskinan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan yang lebih baik.

### **3.5 Upaya dan Hambatan**

#### **3.5.1 Hambatan *Collaborative Governance* dalam Upaya Penanganan Kemiskinan melalui Desa Tuntas Kemiskinan (Desa Tumis) di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah**

Pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam Program Desa Tuntas Kemiskinan (Desa Tumis) di Kabupaten Sragen menghadapi berbagai hambatan yang mengganggu efektivitas dan keberhasilan program. Hambatan-hambatan ini berasal dari berbagai aspek, termasuk sumber daya, kelembagaan, dan komunikasi antar aktor yang terlibat.

##### **1. Keterbatasan Sumber Daya**

Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Banyak desa yang terlibat dalam program ini tidak memiliki cukup tenaga kerja terlatih untuk mengelola dan melaksanakan program secara efektif. Hanya sebagian kecil perangkat desa yang mengikuti pelatihan terkait penanganan kemiskinan kolaboratif, yang mengakibatkan rendahnya kapasitas dalam pelaksanaan program. Selain itu, alokasi anggaran untuk Program Desa Tumis sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan semua desa yang terlibat. Hal ini menghambat pelaksanaan intervensi yang direncanakan, seperti pelatihan keterampilan dan pembangunan infrastruktur.

##### **2. Masalah Konsep dan Kelembagaan**

Ketidakjelasan dalam pembagian peran antar lembaga juga menjadi hambatan signifikan. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki persepsi yang berbeda mengenai tanggung jawab mereka dalam program, yang menyebabkan tumpang tindih tugas dan kurangnya koordinasi yang efektif. Pemerintah desa sering kali merasa terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan, yang mengakibatkan rendahnya partisipasi mereka dalam pelaksanaan program. Kelemahan dalam struktur kelembagaan ini menghambat kolaborasi yang seharusnya terjalin antara pemerintah daerah dan desa.

##### **3. Waktu pelaksanaan Program Desa Tumis**

Pelaksanaan Program Desa Tumis menghadapi hambatan waktu dan koordinasi antar instansi. Waktu pelaksanaan yang singkat tidak sebanding dengan kompleksitas kegiatan, terutama dalam pendataan dan verifikasi warga miskin. Sinkronisasi antar OPD kurang efektif, ditambah perubahan kebijakan yang mengganggu proses di lapangan. Wawancara dengan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin mengungkap bahwa kurangnya sosialisasi dan pembekalan, serta belum optimalnya peran TKPKD, menjadi tantangan utama. Kurangnya pemahaman bersama antar pihak menyebabkan koordinasi lemah. Upaya perbaikan melalui rapat koordinasi dan pelatihan telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program ke depan.

Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa meskipun Program Desa Tumis memiliki potensi untuk mengatasi kemiskinan, tantangan yang ada perlu diatasi melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, perbaikan komunikasi antar aktor, dan penguatan peran

masyarakat dalam pengambilan keputusan. Upaya untuk mengatasi hambatan ini akan sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Sragen.

### **3.5.2 Upaya *Collaborative Governance* dalam Upaya Penanganan Kemiskinan melalui Desa Tuntas Kemiskinan (Desa Tumis) di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah**

Upaya *Collaborative Governance* dalam Program Desa Tuntas Kemiskinan (Desa Tumis) di Kabupaten Sragen bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mencapai tujuan bersama dalam penanganan kemiskinan.

#### **1. Penyusunan Kebijakan Bersama**

Penyusunan kebijakan dalam Program Desa Tumis melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta. Proses ini diatur dalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan, yang menekankan pentingnya keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Musyawarah desa dan forum koordinasi menjadi sarana untuk mendiskusikan dan merumuskan kebijakan yang akan diambil, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

#### **2. Pemberdayaan Masyarakat**

Program Desa Tumis mendorong pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam setiap tahap program. Masyarakat dilibatkan dalam identifikasi masalah, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Pelatihan keterampilan dan pemberian akses terhadap modal usaha menjadi bagian dari upaya pemberdayaan ini. Dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, diharapkan mereka dapat mandiri dan tidak bergantung pada bantuan sosial.

#### **3. Kerjasama antara Sektor**

Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting dalam mendukung pelaksanaan Program Desa Tumis. Sektor swasta berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), yang menyediakan dana dan sumber daya untuk pembangunan infrastruktur dan pelatihan keterampilan. Selain itu, LSM juga berperan dalam memberikan dukungan teknis dan pelatihan kepada masyarakat, sehingga kolaborasi ini menciptakan sinergi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

#### **4. Pemberian akses dan penyuluhan kesehatan**

Program Desa Tumis di Kabupaten Sragen mencakup pemberian akses dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, dengan koordinasi antara tenaga medis dan pemerintah desa. Meskipun demikian, akses kesehatan masih terbatas di beberapa desa akibat kekurangan tenaga medis dan anggaran fasilitas kesehatan. Dalam wawancara dengan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Sragen, dijelaskan bahwa akses kesehatan menjadi bagian penting dalam penanggulangan kemiskinan. Banyak warga miskin yang menghadapi masalah ekonomi dan kesehatan, sehingga Pemerintah Kabupaten Sragen bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat untuk memperbaiki akses dan memberikan penyuluhan kesehatan secara berkala.

## **5. Pelatihan dan pengembangan kapasitas**

Pelatihan dan pengembangan kapasitas merupakan aspek penting dalam Program Desa Tumis, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dan masyarakat dalam menjalankan program. Laporan Pelatihan 2021 oleh Dinas Sosial mencatat bahwa pelatihan administrasi dan manajerial telah dilakukan di beberapa desa, namun pelatihan terkait pengelolaan ekonomi lokal dan inovasi penanggulangan kemiskinan masih dibutuhkan. Masyarakat yang mengikuti pelatihan merasa lebih siap mengelola kegiatan ekonomi berbasis komunitas. Dalam wawancara dengan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Sragen, dijelaskan bahwa pelatihan keterampilan menjadi fokus utama, bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UMKM, serta lembaga pelatihan.

## **6. Penyediaan infrastruktur dan fasilitas dasar**

Penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi menjadi fokus utama dalam Program Desa Tumis. Laporan Pembangunan Infrastruktur 2020 mencatat bahwa beberapa desa telah memperoleh fasilitas tersebut melalui dana CSR dan anggaran pemerintah daerah. Namun, beberapa desa lainnya, terutama yang terletak di daerah terpencil, masih menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap infrastruktur dasar. Dalam wawancara dengan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Sragen, dijelaskan bahwa penyediaan infrastruktur dan fasilitas dasar sangat penting untuk mendukung keberhasilan Program Desa Tumis. Penanggulangan kemiskinan akan kurang efektif jika akses terhadap layanan dasar seperti jalan, sanitasi, dan air bersih terbatas. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sragen bekerja sama dengan dinas teknis seperti DPU PR dan Dinas Kesehatan untuk mengintegrasikan pembangunan fisik ke dalam program ini.

## **7. Monitoring dan evaluasi kolaboratif**

Monitoring dan evaluasi merupakan komponen penting dalam memastikan keberhasilan Program Desa Tumis. Laporan Monitoring 2022 mengungkapkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam koordinasi antar aktor, evaluasi program masih menghadapi kendala, terutama terkait pengumpulan data dan penyesuaian indikator keberhasilan. Namun, beberapa perbaikan telah dilakukan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi. Dalam wawancara dengan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Sragen, dijelaskan bahwa sistem monitoring dan evaluasi di Kabupaten Sragen melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah. Pertemuan rutin dilakukan untuk menilai dampak program terhadap pengurangan kemiskinan dan merumuskan langkah perbaikan jika diperlukan.

## **8. Penggunaan teknologi dalam penyebaran informasi**

Teknologi memiliki peranan penting dalam mendukung kelancaran komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait. Laporan Teknologi 2021 menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten telah mengembangkan aplikasi untuk mendistribusikan informasi terkait bantuan sosial dan program pembangunan lainnya. Namun, kendala masih ada terkait akses internet di beberapa desa terpencil yang menghambat penyebaran informasi secara merata. Dalam wawancara dengan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Sragen, dijelaskan bahwa platform digital seperti aplikasi berbasis web dan media sosial digunakan untuk menyebarkan informasi mengenai program bantuan sosial, pelatihan, dan kesempatan kerja. Selain itu, aplikasi khusus dikembangkan agar masyarakat dapat mengakses informasi terkait status bantuan yang diterima.

### 3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *Collaborative Governance* dalam Program Desa Tuntas Kemiskinan (Desa Tumis) di Kabupaten Sragen telah melibatkan aktor-aktor kunci seperti pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, LSM, dan sektor swasta. Pelibatan multiaktor ini menunjukkan adanya kemauan untuk berkolaborasi, namun masih dihadapkan pada tantangan berupa ketimpangan kekuasaan, kapasitas SDM yang rendah, dan lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan.

Sama halnya dengan temuan penelitian Iza dan Nurhaeni (2021) mengenai Program *Gandeng Gendong* di Yogyakarta, penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan belum sepenuhnya optimal. Dalam kedua program tersebut, masyarakat cenderung terlibat hanya pada tahap pelaksanaan, bukan pada perumusan kebijakan.

Berbeda dengan temuan Wahyunengseh et al. (2020) yang lebih menekankan pada pentingnya regulasi dalam pembentukan kolaborasi berbasis CSR di tingkat kota, penelitian ini menunjukkan bahwa pada tingkat desa, struktur kolaborasi justru lebih dipengaruhi oleh hubungan informal antaraktor, serta oleh faktor sosial dan budaya lokal seperti semangat *gotong royong*.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Abdika Jaya et al. (2023) di Kabupaten Musi Rawas, yang menemukan bahwa kegagalan dalam kolaborasi sering disebabkan oleh lemahnya desain kelembagaan dan tidak adanya pemahaman bersama terkait definisi kemiskinan. Dalam konteks Sragen, desain kelembagaan seperti TKPKD dan forum musyawarah desa sudah terbentuk, namun implementasinya belum maksimal karena tidak semua aktor memiliki persepsi yang sama tentang indikator keberhasilan program.

Temuan ini juga mendukung penelitian Samin Latif (2018) yang menyatakan bahwa pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam pengentasan kemiskinan di Gorontalo menghadapi hambatan dari dominasi pemerintah dan terbatasnya peran aktor non-negara. Dalam konteks Sragen, dominasi pemerintah kabupaten juga tampak dalam pengambilan keputusan dan pembagian peran yang belum setara antara OPD dan perangkat desa.

Namun, berbeda dengan Yunas dan Nailufar (2019) yang menemukan keberhasilan *Collaborative Governance* dalam Program Kampung KB di Jombang karena adanya peran aktif sektor swasta dan dukungan anggaran memadai, penelitian ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Sragen, keterlibatan sektor swasta melalui CSR belum terkoordinasi secara optimal dan dukungan anggaran masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program.

Dengan demikian, diskusi ini memperjelas bahwa keberhasilan *Collaborative Governance* sangat ditentukan oleh kejelasan peran kelembagaan, kapasitas aktor lokal, dan keterbukaan komunikasi antarpihak. Penelitian ini memberikan kontribusi untuk memperkaya pemahaman mengenai dinamika kolaborasi dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis desa, serta menekankan pentingnya penguatan partisipasi masyarakat dan peran kepemimpinan fasilitatif untuk mencapai tujuan bersama secara berkelanjutan.

## IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* dalam Program Desa Tuntas Kemiskinan (Desa Tumis) di Kabupaten Sragen memiliki peran signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan LSM, program ini berhasil merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin. Keberhasilan program ini mencerminkan penerapan model *Collaborative Governance* yang menekankan dialog, komitmen, kepercayaan, dan pemahaman bersama antar aktor.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yakni jumlah sampel yang diambil dari masyarakat penerima manfaat, yang mungkin tidak mewakili seluruh populasi. Selain itu, waktu pelaksanaan penelitian yang terbatas mengakibatkan tidak semua aspek dari program dapat dieksplorasi secara mendalam. Ketergantungan pada data sekunder yang mungkin tidak selalu akurat atau terkini juga dapat mempengaruhi hasil analisis.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work):** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan dengan fokus pada peningkatan jumlah sampel untuk mendapatkan gambaran yang lebih representatif mengenai dampak Program Desa Tumis. Penelitian longitudinal juga dapat dilakukan untuk mengevaluasi keberlanjutan dan dampak jangka panjang dari program ini terhadap masyarakat. Selain itu, eksplorasi lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program, serta strategi untuk meningkatkan keterlibatan mereka, juga perlu dilakukan. Analisis perbandingan dengan program serupa di daerah lain dapat memberikan wawasan mengenai praktik terbaik dan inovasi dalam penanganan kemiskinan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami peran *Collaborative Governance* dalam penanganan kemiskinan dan membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut yang dapat meningkatkan efektivitas program-program serupa di masa depan.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Sosial Kabupaten Sragen beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of public administration research and theory*, 22(1), 1-29.
- Fakhriansyah, M. A. (2023). *Optimalisasi penggunaan dana dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Ghonniyu, A. R. (2024). *Evaluasi penggunaan dana alokasi umum pada APBD tahun anggaran 2022 di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Huberman, A. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*.
- Iza, S. M., & Nurhaeni, I. D. A. (2021). Proses kolaborasi dalam penanganan kemiskinan: Studi kasus pada Program Gandeng Gendong di Yogyakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1(2), 365-379.
- Intania, D. I. (2023). *Implementasi Program Sembako di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Jaya, A., Murahman, M., & Muslimin, A. (2023). Collaborative governance dalam penanggulangan kemiskinan Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Masda*, 2(2), 114-121.
- Kumar, R. (2018). *Research methodology: A step-by-step guide for beginners*.
- Latif, S. (2018). Model collaborative governance dalam penanggulangan kemiskinan di daerah (Studi kasus dalam Program Dusun Terpadu Mandiri di Boalemo Provinsi Gorontalo). In *Proceedings of International Interdisciplinary Conference on Sustainable Development Goals (IICSDGs)* (Vol. 1, No. 1, pp. 131-143).

- Saputra, D. J. (2022). Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Aplikasi Pandu Online di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen (Doctoral dissertation, IPDN).
- Sen, A. (2014). *Development as freedom* (1999). In *The globalization and development reader: Perspectives on development and global change* (p. 525).
- Sugiharto, A. S. Z., Joko, M., & SH, M. (2024). *Efektivitas program keluarga harapan (PKH) dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Wahyunengseh, R. D., Hastjarjo, S., & Suharto, D. G. (2020). Disseminasi komponen collaborative governance untuk penyusunan peraturan walikota tentang penanggulangan kemiskinan. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, 9(2), 78-84.
- Yunas, N. S., & Nailufar, F. D. (2019). Collaborative governance melalui program kampung KB di Kabupaten Jombang. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 162-173.

